

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Daryanto. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya : Apollo
- Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2007. *Pedoman Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Estetika Indonesia*. Jakarta: Departemen RI.
- Elisabeth Nurhani Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- H. Muntaha. 2017. *Hukum Pidana Malpraktek: Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*. Jakarta: Sinar Garfika.
- Maroni. 2015. *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*. Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Masrudi Muchtar, 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Yang Melakukan Malpraktek Medis Dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia*. Jentera Hukum Borneo, Volume 4 No.1
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Philippus M. Hadjon, et.al. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ridwan HR. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rospita Adelina Siregar. 2023. *Hukum Kesehatan Berdasarkan: UU RI No.1 Tahun 2023 tentang KUHP; UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2009. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua. Jakarta: Rajawali Pres.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Cet.V. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shinta Hadiyantina, et al. 2024 *Hukum Perizinan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta

Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Tesis dan Disertasi :

Bagus Teguh Santoso, 2020, *Dekonstruksi Konsep Sanksi Pidana Administrasi (Administrative Penal Law) Dalam Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya.

Fitriana Murniati. 2007. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Administrasi Dalam Bidang Kesehatan di Indonesia*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang

Khairunnisa. 2008. *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Pasca Sarjana, Medan.

Jurnal :

Ana Firli dan Rusdianto Sesung. 2025. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Oleh Klinik Kecantikan Yang Tidak Memiliki Izin*. Journal Evidence Of Law, Volume 4 No.2.

Andin Rusmini. 2016. *Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jurnal Hukum Al-Adl, Volume 8 No.3.

April Hidayat, et. al. 2023. *Analisis Yuridis Terhadap Praktek Kedokteran Tanpa Izin di Indonesia*. Journal Of Social Science Research, Volume 3 No.2.

Dwi Lestari, et.al., 2025, *Analisis Perlindungan Konsumen Dalam Kasus Produk Skincare Yang Mengandung Merkuri (Studi Kasus Skincare Lightening Cream dan Night Cream Merk MH Yang Dijual Secara Online)*. Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Volume 2 No.1

Dyan Mei Ikawati, et.al. 2024. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Malpraktek Pada Klinik Kecantikan Ditinjau Dari UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Jurnal IUS Vol.12.

Elwi Danil. 2020. *Penerapan prinsip ultimum remedium terhadap Tindak Pidana Administrasi*. Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Volume 01 No.01.

- Erni Agustina, Handoyo Prasetyo dan Subakdi. 2018. *Teori Tanggung Jawab Berjenjang (Cascade Liability Theory) Dalam Tindak Pidana Korporasi di Indonesia*. Jurnal Spektrum Hukum. Volume 15 No.2.
- Fazindra Adiansa, et.al. 2024. *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan*. Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol.2.
- Fransiskus Xaverius Julanta Sinuraya, Mahmud Mulyadi, dan Syarif Lisa Andriati. 2024. *Penerapan Hukum Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Peredaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Perkara Pidana No. 390/Pid.Sus/2021/Pn Jkt Sel*. Journal Of Science And Social Research, Volume 7 No.4.
- Gunawan Nachrawi dan Christiyanti Dewi. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 351/Pid.Sus/2018/PN.SMn)*. Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Volume 6 No.2. Oktober 2021.
- I Gusti Ayu Apsari Hadi. 2018. *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Tindakan Malpraktek Medis*. Jurnal Yuridis, Volume 5 No.1.
- I Made Walesa Putra dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa. 20204. *Prospek Deferred Prosecution Agreement Untuk Preferensi Penegakan Hukum Administrasi Mengingat Karakteristik Administrative Penal Law Bidang Perpajakan*. Volume 2 No.1.
- Indah Sari. 2020. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Unibersitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Volume 11 No.1.
- Jelli Putra Amanda, Yetti, dan Sandra Dewi. 2024. *Penegakan Hukum Terhadap Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar*. Collegium Studiosum Journal. Vol.7 No.2.
- Nabila Sidik, Muhyi Mohas dan Reine Rifiana, 2025, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Penipuan Dokter Palsu (Studi Kasus Putusan No.1747/Pid.B/2023/PN.Sby)*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 20 No.1.

- Nina Herlina. 2019. *Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 7 No.2.
- Rinneke Wahyono, et. al. *Tinjauan Hukum Kasus Ria Klinik Kecantikan Dermaroller Yang Tidak Berizin Edar di Jakarta*. Jurnal Hukum Indonesia. Volume 4 No.1. Januari 2025.
- Sahda Saraswati Akbar, et.al. 2025. *Pertanggungjawaban Hukum Owner Skincare Terkait Overclaim Pada Produk Kecantikan*. Forschungforum Law journal. Volume 2 No.1.
- Shinta Agustina, 2015, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Masalah-masalah Hukum Volume 44 No.4.
- Syafril Moh Nur S. Molou, Dian Ekawaty Ismail, dan Suwitno Yutye Imran. 2023. *Problematika Hukum Asas Lex Specialis*. Collegium Studiosum Journal, Volume 6 No.2.
- Tatiek Sri Djatmiati. 2018. *Perizinan Sebagai Instrumen Pengendalian Dalam Hukum Administrasi*. Jurnal Rechts Vinding, Volume 7 No.1.
- Theresia Gabriella dan Handar Subhandi Bakhtiar. 2023. *Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal*. Jurnal Panorama Hukum, Volume 8 No.1.
- Wijayanto, et.al. 2021. *Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Brawijaya Law Student Journal, Volume 10.
- Zuhdi Arman dan Riko Riyanda, 2022, *Administrative Penal Law Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 17 No.2.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang

Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan No.14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan No.11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Subsektor Kesehatan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Sumber Internet :

<https://www.alodokter.com/dermaroller-kenali-manfaat-dan-carapaknya#:~:text=Dermaroller%20merupakan%20alat%20untuk%20merangsang,bagi%20kecantikan%20dan%20kesehatan%20kulit>, diakses pada tanggal 28 September 2025, pukul 22.00 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-1t4be012381c490/>, diakses pada tanggal 6 Desember 2025, pukul 05.18 WIB.

<https://izinkilat.id/KBLI-single-purpose:-kenapa-tak-bisa-digabung#:~:text=Single%20Purpose%20berarti%20ada%20jenis,dengan%20sta>

Masya Intan Riani, 2026

PENERAPAN TINDAK PIDANA ADMINISTRASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN DERMAROLLER PADA KLINIK KECANTIKAN

UPN Veteran Jakarta, Magister Hukum, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

ndar%20yang%20ditetapkan%20pemerintah. diakses pada tanggal 8
Desember 2025, pukul 16.33 WIB.

https://sipp.pn-jakartaselatan.go.id/index.php/detil_perkara, diakses pada tanggal
31 Desember 2025, Pukul 14.16 WIB.

https://sipp.pn-makassar.go.id/index.php/detil_perkara, diakses Pada Tanggal 31
Desember 2025, Pukul 15.05 WIB.

Sumber lainnya :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Putusan Pengadilan No.219/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan No.176/Pid.Sus/2025/PT.DKI